

# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

---

---



**SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2021 - 2026**

---

---

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5(lima) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sementara proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan tata cara dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses dan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sehingga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna .

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2026 ke depan.

Benteng, 2023

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar



**MASDARI PRATAMA, S.Kom,MM**

Pangkat : Pembina c

NIP. 198406022010011012

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Sekretaris DPRD.....	8
2.1.2 Bagian Umum dan Keuangan.....	9
2.1.3 Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan.....	10
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	12
2.2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD .....	12
2.2.2 Aset/Modal Sekretariat DPRD.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	22
<b>BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	28
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan telaahan renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD .....	33
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Tujuan.....	41
4.2 Sasaran.....	42
<b>BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN .59</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	59
6.2 Indikator Kinerja .....	63
6.3 Kelompok sasaran .....	65
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VIII.PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	7
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	8

DAFTAR ISI

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....12

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 12

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 13

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 13

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 13

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 14

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 14

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026..... 15

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ..... 16

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar .....27

Tabel 3.2 Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar .....29

Tabel 3.3 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD.....35

Tabel 3.4 Skor Kriteria Penentuan isu strategis.....38

Tabel 3.5 Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis.....38

Tabel 3.6 Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Sekretariat DPRD.....39

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 .....44

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 ..... 46

Tabel 4.3 Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 ..... 48

Tabel 4.4 Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD

	dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	49
Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	53
Tabel 5.2	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	55
Tabel 5.3	Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	57
Tabel 5.4	Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Terlampir)	
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Sekretriat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	64
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama Sekretriat DPRD Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah **Rencana Strategis** Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari SKPD tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Tahunan SKPD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

Landasan hukum terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Kab.Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kab.Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab.Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.Kepulauan Selayar Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan resntra 2021 - 2026 adalah

1. Dokumen Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai mitra kerja eksekutif 5 (lima) tahun kedepan.

2. Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016 – 2021 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Sekretaris DPRD dan seluruh stekholder dibawahnya

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Sekretaris Dewan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dalam perangkat daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB. I Pendahuluan**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB. II Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat DPRD**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD

##### **BAB. III Permasalahan dan Isu –Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang rumusan Tujuan dan Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurunwaktu 2016-2021.

#### **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurunwaktu 2016-2021 berdasarkan visi misi RPJMD

#### **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indukatif

#### **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam Bab ini dikemukakan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

#### **BAB. VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKREARIAT DPRD

#### 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah "*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah*".

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum perubahan Renstra dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum dan keuangan terdiri dari :
  - Sub. Bagian Program dan keuangan
  - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Bagian Pengawasan dan penganggaran
  - Sub. Bagian Fasilitasi Penganggaran
  - Sub. Bagian Fasilitasi Pengawasan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Sub. Bagian kajian perundang-undangan

- Sub. Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi

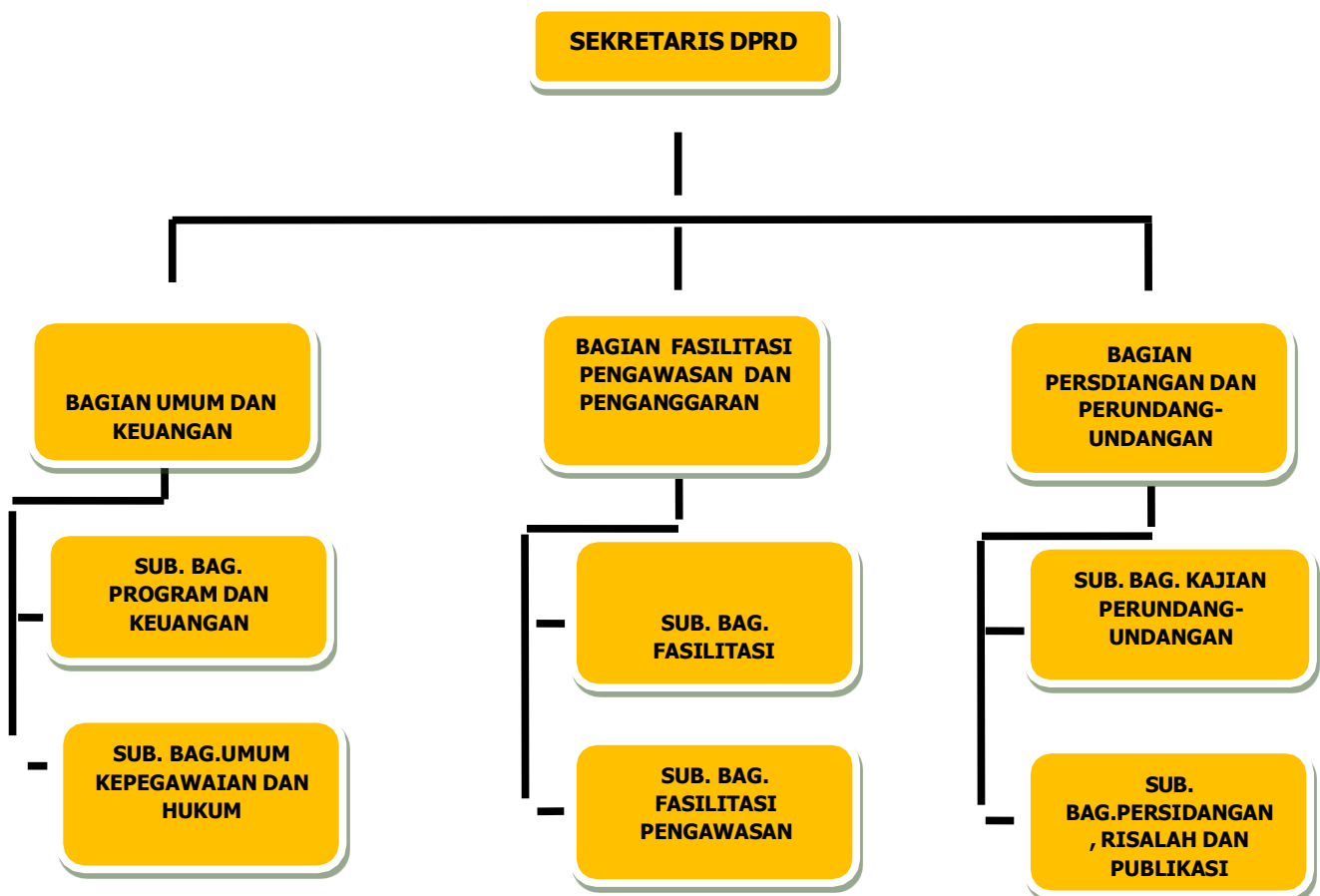
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setelah perubahan Renstra dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
  - Sub. Bagian Program dan Keuangan;
  - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- b. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum perubahan Renstra dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**



Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setelah perubahan Renstra dapat dilihat pada Gambar 2.2

**Gambar 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**



*Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023*

### 2.1.1 Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD

- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

### **2.1.2 Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian umum dan keuangan merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum dan keuangan , berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain.

Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan), melaksanakan fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

### **2.1.3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi, melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan

m. menyelenggarakan keprotokolan.

#### **2.1.4 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan**

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), melaksanakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 82 ( Delapan Puluh Dua ) orang yang terdiri dari 25 Orang yang berstatus PNS dan 56 Orang yang berstatus PTT kemudian sampai dengan tahun 2023 setelah diadakannya perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 94 ( Sembilan Puluh Empat ) orang yang terdiri dari 27 Orang yang berstatus PNS dan 67 Orang yang berstatus PTT dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Golongan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	-	-	-
Golongan II	9	2	11
Golongan III	1	7	8
Golongan IV	2	2	4
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sekretariat DPRD  
Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Golongan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	0	0	0
Golongan II	9	2	11
Golongan III	1	9	10
Golongan IV	4	2	6
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2023.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Jabatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II	1		1
Eselon III	1	2	3
Eselon IV	1	5	6
Non Struktural (Staf)	11	5	14
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat DPRD  
Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Jabatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II	1	0	1
Eselon III	3	0	3
Eselon IV	0	2	2
Non Struktural (Staf)	10	11	21
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2023.

**Tabel 2.5**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>No</b>	<b>PEGAWAI</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					<b>JUMLAH</b>
		<b>SMA</b>	<b>D2</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	
<b>A.</b>							
1.	Esalon II					1	1
2.	Esalon III				2		2
3.	Esalon IV				6		6
<b>B.</b>							
4.	<b>Non Struktural</b>						
5.	Kontrak	31	1	1	23		56
6.	Sukarela						
	<b>TOTAL</b>						

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020.

**Tabel 2.6**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

No	PEGAWAI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	D2	D3	S1	S2	
<b>A.</b>							
1.	Esalon II					1	1
2.	Esalon III				2	1	3
3.	Esalon IV				1	1	2
<b>B.</b>							
4.	<b>Non Struktural</b>	10			10	<b>1</b>	21
5.	Kontrak	33		2	<b>31</b>	<b>1</b>	67
6.	Sukarela						
	<b>TOTAL</b>						<b>94</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2023.

**2.2.2 Aset/Modal Sekretariat DPRD**

Asset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 dan tahun 2023 (setelah perubahan Renstra), sebagaimana uraian tabel berikut :

**Tabel 2.7**

**Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas	5 unit	
	- Mobil	5 unit	
	- Motor	36 unit	
2.	Perlengkapan Kerja	13 unit	
	- Komputer PC	18 unit	
	- laptop	16 unit	
	- Printer		
	- Mesin Tik		
	- Mesin Fotocopy	30 unit	
	- AC	2 unit	
	- Mesin Air	24 unit	
	- Meja	58 unit	
	- Kursi	5 unit	
3.	Gedung Kantor		

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2020

**Tabel 2.8**

**Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD  
Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>No.</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil	5 unit	
	- Motor	36 unit	
2.	Perlengkapan Kerja		
	- Komputer PC	15 unit	
	- laptop	24 unit	
	- Printer	18 unit	
	- Mesin Tik		
	- Mesin Fotocopy	33 unit	
	- AC	2 unit	
	- Mesin Air	25 unit	
	- Meja	58 unit	
	- Kursi		
		5 unit	
3.	Gedung Kantor		

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar, 2023.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar adalah fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kab Kepulauan Selayar (supporting), yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Tingkat Capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Setwan Periode sebelumnya dapat dilihat pada table 2.6 dan table 2.9 berikut :

**Tabel 2.9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai AKIP SKPD	A	C	C	CC	B	B	C	C	C	C	C					
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	100	100	100	100	100	82,61	85	85	90	100	0,82	0,85	0,90	1	1
3	Tingkat pelayanan dalam pembahasan produk hukum ( Ranperda ) ( dalam % )	100 %	100	100	100	100	100	84,61		100	100	100	84,61	1	1	1	1

4	Tingkat Pelayanan dalam rapat rapat alat kelengkapan dewan (dalam %)	100 %	100	100	100	100	100	74,59		88,33	1	99	74,59	1	1	1	1
5	Tingkat pelayanan pelaksanaan rapat rapat koordinasi konsultasi kedalam dan luar daerah dan kunjungankerja anggota DPRD (dalam %)	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	1	1	1	1	0,95
6	Tingkat pelayanan pelaksanaan bimtek/workshop anggota DPRD (dalam % )	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7	Tingkat pelayanan dalam pelaksanaan Reses	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

8	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9	Indeks kepuasan DPRD																	

Pada tabel T-C 23 diatas dapat kami kemukakan bahwa pelayanan Secara umum, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Renstra periode 2016 – 2020 memenuhi target yang telah ditetapkan. Semua program dan kegiatan pada secretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik namun persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD belum memenuhi target, Untuk Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan persentase peningkatan sarana dan prasarana memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah , rasio tingkat capaian kinerja pelayanannya cenderung stagnan.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Tahun Awal Perencanaan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Belanja Tidak Langsung		1.568.411.000	1.759.357.000	1.935.290.000	2.028.650.000	2.055.650.000	1.532.933.580	1.693.517.800	1.877.492.346	1.892.329.410	2.006.825.187	97%	96%	97%	93%	98%	121.809.750	134.227.901

Belanja Langsung	8.635.500.0	9.096.7	9.518.92	9.856.	17.145	8.231.9	8.618.7	9.163.	9.474.	16.381.	9	9	9	9	9	2.127	2.037.
	00	78.000	0.000	023..0	.038.1	71.967	23.253	429.4	902.36	114.96	5	5	5	6	6	.134.	285.7
				00	00			68	5	8	%	%	%	%	%	525	50

Sedangkan pada table T-C 24 secara umum rasio realisasi anggaran dari tahun 2016-2021 rata rata 95 – 98 %, dapat kami kemukakan cukup baik. Dapat dilihat dari rasio kegiatan pada program capaian tiap belum mencapai 100 %. Hal – hal yang mempengaruhi rasio realisasi anggaran ini diantaranya kurangnya personil / SDM yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya, bahkan dari segi kuantitas SDM pada sekretariat DPRD masih kurang.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Analisis Renstra Sekretariat Jenderal DPRD RI**

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat.

Di sisi kelembagaan , Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan supporting system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut tidak dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran.

##### **Analisis Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu tantangan dalam pelayanan adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, merupakan tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat kondisi saat ini, berbagai kendala dan hambatan dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang ideal, dikarenakan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi diantaranya, motivasi, kedisiplinan, ketekunan, sistem pengkaderan, penyegaran, lemahnya penerapan sanksi, pemahaman terhadap tugas pokok sangat rendah, mekanisme koordinasi antar pegawai kedalam dan keluar daerah sering tidak terarah serta dampak lainnya yang dianggap berpotensi negative terhadap percepatan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Menurut Analisis SWOT pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

*Kekuatan ( Strength) :*

- b. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- c. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- d. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- e. Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi
- f. Tingginya komitmen dan Kerjasama yang baik antara staf

*Kelemahan ( Weakness):*

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuatitas maupun kualitas .
- b. Beben kerja secretariat yang merata
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- d. Tingginya frekwensi kerja insidentil
- e. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupuksi masing masing

- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

*Peluang (Opportunity) :*

- a. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- d. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

*Tantangan (Threat):*

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut semakin cepat, tepat, serta mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku inilah yang menjadi permasalahan utama pada sekretariat DPRD yakni **Belum Optimalnya Dukungan layanan Sekretariat DPRD Terhadap Peningkatan Kapasitas/kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya yakni fungsi anggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan**

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat digambarkan sebagai berikut

#### A. Faktor Internal

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas

- b. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing
- c. Beban kerja secretariat yang tidak merata
- d. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- e. Tingginya frekwensi kerja insidentil
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

**B. Faktor Eksternal**

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi secretariat

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Selayar**

MASALAH POKOK		MASALAH	AKAR MASALAH
1.	<b>Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan</b>	Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur sipil Negara yang belum memahami Tupoksi</li> <li>2. Beban Kerja Sekretariat yang tidak merata</li> <li>3. Tingginya frekwensi kerja insidentil</li> <li>4. Kurang disiplin dan motovasi kerja aparatur</li> </ol>
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung perkantoran yang kurang refresentatif</li> <li>2. Peralatan kerja yang masih kurang</li> </ol>
		Pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak terprogram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya</li> <li>2. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi yang berubah</li> <li>3. Dinamika politik yang selalu berubah</li> </ol>

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, manageable, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, Visi RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat dan mandiri , serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan visi RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.**

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industry. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritime adalah : 1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplay kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non perikanan ; Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah .

Bandar maritime didukung oleh 3 pilar pembangunan yaitu :

- 1) Kawasan Distribusi Logistik
- 2) Kawasan ekonomi Khusus

3) Kawasan industri Perikanan terpadu

Berdasarkan dari landasan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten kepulauan Selayar, maka misi RPJMD 2021– 2026 adalah :

- 1) Mengembangkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 4) Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman
- 5) Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
- 6) Meningkatkan pengelolaan Lingkungan hidup

**Tabel 3.2**

**Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar**

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Bandar Maritim
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa	Bandar Maritim

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik	Bandar Maritim
4.	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan	pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki	Bandar Maritim
5.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah	Bandar Maritim

Adapun misi RPJMD sebagai berikut :

**Misi 1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **tujuan** pembangunan :

- a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan **sasaran** berikut ini :
  - a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

**Misi 2** : Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan memiliki **tujuan** pembangunan :

- a. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan , dengan **sasaran** berikut ini :
  - a) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
  - b) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya local
  - c) Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian pedesaan

**Misi 3** : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia, dengan **sasaran** berikut ini :

- a) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- b) Meningkatnya daya beli masyarakat

**Misi 4** : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman , memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Menoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman, dengan **sasaran** berikut ini :

- a) Meningkatkan usaha perikanan
- b) Meningkatnya usaha pariwisata
- c) Meningkatnya usaha kepelabuhanan

**Misi 5** : Meningkatkan Pembinaan kehidupan social keagamaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya , dengan **sasaran** berikut ini :

- a) Meningkatnya upaya pelestarian nilai nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social
- b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan
- c) Meningkatnya fasilitasi pembinaan keagamaan

**Misi 6** : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup , dengan **sasaran** berikut ini :

- a) Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Bertitik tolak dari 6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secretariat DPRD mendukung misi 1 yakni :

**Misi ke-1** : **"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan"**.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi

yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu : meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan program dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

### **3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPRD RI**

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Nqn ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat.

Di sisi kelembagaan , Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan supporting system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut tidak dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran.

#### **3.3.2 Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu tantangan dalam pelayanan adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, merupakan tantangan tersendiri oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat kondisi saat ini, berbagai kendala dan hambatan dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang ideal, dikarenakan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi diantaranya, motivasi, kedisiplinan, ketekunan, sistem pengkaderan, penyegaran, lemahnya penerapan sanksi, pemahaman terhadap tugas pokok sangat rendah, mekanisme koordinasi antar pegawai kedalam dan keluar daerah sering tidak terarah serta dampak lainnya yang dianggap berpotensi negative terhadap percepatan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kepulauan Selayar**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kepulauan Selayar (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Kab.Kepulauan Selayar yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata.

b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional.

c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 - 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;

b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan

c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rancangan pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Dalam Perda RTRW Kab. Kepulauan Selayar (Perda No. 9 Tahun 2009), di Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah yang memegang peranan penting yaitu Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda, merumuskan kebijakan, membuat peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk semua kegiatan, fungsi anggaran Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. dan fungsi pengawasan, fungsi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

#### **3.4.2. Telaahan KLHS kabupaten Kepulauan Selayar**

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

**Tabel 3.3**

**Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD**

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
4.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.
5.	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian & perkebunan serta perikanan

6.	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif, Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, & Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayardalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor permasalahan tersebut yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal.Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

- a. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- b. Struktur kelembagaan yang semakin mendukung
- c. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang
- d. Dukungan sarana dan prasarana kantor yang cukup baik
- e. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat.
- f. Peningkatan Sumber daya Aparatur yang berkesinambungan
- g. Terjadinya mis komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan
- h. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar ketersediaan saran dan prasarana tetap berkesinambungan
2. Mempersiapkan program kerja (*Time Schedule*) dalam mengawali tugas dan fungsinya
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
4. Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.
5. Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.
6. Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi Bersama

Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan skor kriteria, nilai skala kriteria, dan rata-rata skor kriteria sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**

**Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis**

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**Tabel 3.5**

**Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis**

<b>No</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Nilai Skala Kriteria Ke-</b>					<b>Total Skor</b>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengupayakan agar ketersediaan sarana dan prasarana tetap berkesinambungan	4	4	3	3	4	18
2.	Mempersiapkan program kerja ( <i>Time Schedule</i> ) dalam mengawali tugas dan fungsinya	4	4	4	3	4	19
3.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan	4	4	4	4	3	19

	Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya						
4.	Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.	4	3	3	4	4	18
5.	Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi Bersama	4	4	4	3	4	18
6.	Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.	4	3	3	4	3	17

**Keterangan :**

Penentuan Skala Kriteria berdasarkan Likert :

0 - 1: Rendah ; > 1 - 2 :Sedang ; > 2 - 3:Cukup ; > 3 - 4: Tinggi

**Tabel 3.6**

**Rata-rata Skor Kriteria dan Peringkat Isu Strategis Sekretariat DPRD**

Peringkat	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempersiapkan program kerja ( <i>Time Schedule</i> ) dalam mengawali tugas dan fungsinya	19	3,8
2.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	19	3,8
3.	Mengupayakan agar ketersediaan sarana dan prasarana tetap berkesinambungan	18	3,6

<b>Peringkat</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Total Skor</b>	<b>Rata-Rata skor</b>
4.	Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan perubahan.	18	3,6
5.	Peningkatan situasi yang kondusif agar Peningkatan situasi yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dan DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi Bersama	18	3,6
6	Mengadakan komunikasi yang baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait.	17	3,4

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Sekretariat DPRD kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah menetapkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih Periode Tahun 2022-2026. Adapun Visi tersebut adalah : **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2022 – 2026, menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan (Kemaritiman).
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka keterkaitan tujuan pelayanan Sekretariat DPRD dapat diuraikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Keterkaitan penyelenggaraan bidang urusan penunjang pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran pada RPJMD, yaitu :

## **Misi Ke-1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pelayanan Sekretariat DPRD bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan sasaran, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1), dengan 3 (tiga) indikator masing-masing :

1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat,
2. Nilai SAKIP Daerah, dan
3. Indeks Pengelolaan keuangan.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD***

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD
3. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan

**Tabel. 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-						Kondisi pada akhir RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8		
	<b>Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>		Indeks reformasi sekretariat DPRD	33,89 ( C )	55,00 ( CC )	64,00 ( CC )	68,00 ( B )	73,00 ( B )	76,00 ( A )	76,00 ( A )
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Sakip OPD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80	A ( 80 )

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	N/A	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100	100
	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat		65	70	75	80	85	85

**Tabel. 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Kepulauan Selayar Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-						Kondisi pada akhir RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5		6	7	8		
<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD</b>	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Secretariat DPRD	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)	76,00 (A)
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80	A ( 80 )
		Laporan Keuangan yang sesuai Standar	N/A	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

		Akuntansi Pemerintahan							
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100	100
	fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD		65	70	75	80	85	85

**Tabel 4.3**

**Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD**

**Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

RPJMD			RESNTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indicator	Tujuan	Sasaran	Indicator
<b>Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan</b>					
<b>Tujuan ke-1 :</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	<b>Sasaran ke-1 :</b> Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	1. Nilai Sakip Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Indeks Pengelolaan keuangan	<b>Tujuan ke-1 :</b> <b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD</b>	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	1. Nilai Lakip Sekretariat DPRD
				2. Meningkatkan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	2. Laporan Keuangan yang sesuai SAP
				3. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	3. Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu 4. Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat

**Tabel 4.4**

**Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRD**

**Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

RPJMD			RESNTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indicator	Tujuan	Sasaran	Indicator
<b>Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan</b>					
<b>Tujuan ke-1 :</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	<b>Sasaran ke-1 :</b> Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	1. Nilai SAKIP Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Indeks Pengelolaan keuangan	<b>Tujuan ke-1 :</b> <b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD</b>	1. Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
				2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	2. Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
					3. Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu 4. Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensip tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program –program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yag selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebjakan. Strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurut Analisis SWOT pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

*Kekuatan ( Strenght) :*

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi
- g. Tingginya komitmen dan Kerjasama yang baik antara staf

*Kelemahan ( Weakness):*

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas .
- b. Beban kerja sekretariat yang merata
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- d. Tingginya frekwensi kerja insidentil
- e. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupuksi masing masing
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

*Peluang (Opportunity) :*

- a. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- d. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

*Tantangan (Threat):*

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD )
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023 56 strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih

optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Sekretariat DPRD .

**Tabel 5.1**

**Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana prasarana 3. Penigkatan kualitas SDM
	Meningkatnya AKuntabilitas kinerja Sekreariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	
	Meningkatnya Pengeloaan keuangan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pengelolaan Keiangan	
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

	<p>Meningkatnya kualitas dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan</p>	<p>Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli</li> <li>2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan</li> </ol>
--	---	--	--

**Tabel 5.2**

**Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi daerah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana prasarana 3. Penigkatan kualitas SDM
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan Keiangan	
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	3. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 4. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan
--	---	---	--

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra 2021-2026 ini juga diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Sekretariat DPRD berkontribusi terhadap pencapaian Misi 1 yakni Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan , dengan Tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan sasaran Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Berikut relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan , Sasaran pada Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3**

**Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan dan sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan /Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan</b>	<b>Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD</b>	<b>Indeks reformasi Sekretariat DPRD</b>	CC – A (55 – 76)
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Nilai lakip OPD	C – AA ( 60 – 80 )
		Laporan Keuangan yang sesuai SAP	sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100
		Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	65 - 85

**Tabel 5.4**

**Relevansi Sasaran RPJMD dan Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat  
DPRD Setelah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026**

<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan dan sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan /Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks reformasi Sekretariat DPRD	CC – A (55 – 76)
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	C – AA ( 60 – 80 )
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100
		Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	65 - 85

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

#### **6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota**

###### **a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **b. Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

###### **c. Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistic Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

#### i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD

#### j. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

### 6.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

#### a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Laporan Semester
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Orientasi DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program Kerja DPRD

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat

- Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Berikut Rencana Program Kegiatan Sekretariat DPRD Beserta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
Mewujudkan Reformasi Sekretariat DPRD	Meningkatnya Nilai SAKIP		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan		100 %	21,075,396,812	100 %	21,363,918,994	100 %	21,898,657,887	100 %	22,424,006,689	100 %	22,959,043,489	22,959,043,489	Setwan	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Sekretariat DPRD sesuai SAP	Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %						
		01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		100 %	311,604,000	100 %	320,034,200	100 %	328,885,910	100 %	338,180,206	100 %	397,939,216	397,939,216		
		01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		5 Dok	81,000,000	5 Dok	81,000,000	5 Dok	81,000,000	5 Dok	81,000,000	5 Dok	131,000,000	131,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	17,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	1 Dok	17,000,000	17,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	14,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	14,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Lap	77,604,000	12 Lap	81,484,200	12 Lap	85,558,410	12 Lap	89,836,331	12 Lap	94,328,147	94,328,147	Setwan	Benteng
		01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	91,000,000	1 Lap	95,550,000	1 Lap	100,327,500	1 Lap	105,343,875	1 Lap	110,611,069	110,611,069	Setwan	Benteng
		01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu		100 %	2,268,981,780	100 %	2,284,527,780	100 %	2,268,981,780	100 %	2,268,981,780	100 %	2,268,981,780	2,268,981,780		
		01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan		26 Orang/bulan	2,060,637,780	26 Orang/bulan	2,060,637,780	26 Orang/bulan	2,060,637,780	26 Orang/bulan	2,060,637,780	26 Orang/bulan	2,060,637,780	2,060,637,780	Setwan	Benteng
		01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	5,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dok	62,130,000	12 Dok	62,130,000	12 Dok	62,130,000	12 Dok	62,130,000	12 Dok	62,130,000	62,130,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dok	48,890,000	12 Dok	48,890,000	12 Dok	48,890,000	12 Dok	48,890,000	12 Dok	48,890,000	48,890,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	12,000,000	1 Lap	12,000,000	1 Lap	12,000,000	1 Lap	12,000,000	1 Lap	12,000,000	12,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dok	45,870,000	1 Dok	45,870,000	1 Dok	45,870,000	1 Dok	45,870,000	1 Dok	45,870,000	45,870,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		12 Lap	34,454,000	12 Lap	50,000,000	12 Lap	34,454,000	12 Lap	34,454,000	12 Lap	34,454,000	34,454,000	Setwan	Benteng
		01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dok		Dok		Dok		Dok		Dok			Setwan	Benteng
		01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat		100 %	53,910,000	100 %	53,910,000	100 %	53,910,000	100 %	53,910,000	100 %	53,910,000	53,910,000		

	01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	Setwan	Benteng
	01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Setwan	Benteng
	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	12 Lap	38,910,000	Setwan	Benteng
	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	12 Lap	10,000,000	Setwan	Benteng
	<b>01.2.04</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>	<b>528,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>553,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>579,250,000</b>	<b>100 %</b>	<b>606,812,500</b>	<b>100 %</b>	<b>635,753,125</b>	<b>100 %</b>	<b>635,753,125</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja / Ujuran sasaran program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
		01.2.04.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Setwan	Benteng	
		01.2.04.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	Setwan	Benteng	
		01.2.04.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Dok	28,000,000	12 Dok	28,000,000	12 Dok	28,000,000	12 Dok	28,000,000	12 Dok	28,000,000	12 Dok	28,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.04.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	150,000,000	10 Orang	157,500,000	10 Orang	165,375,000	10 Orang	173,643,750	10 Orang	182,325,938	10 Orang	182,325,938	Setwan	Benteng
		01.2.04.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	Setwan	Benteng	
		01.2.04.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		29 Orang	350,000,000	29 Orang	367,500,000	29 Orang	385,875,000	29 Orang	405,168,750	29 Orang	425,427,188	29 Orang	425,427,188	Setwan	Benteng
		<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum</b>		<b>100 %</b>	<b>953,846,000</b>	<b>100 %</b>	<b>836,697,800</b>	<b>100 %</b>	<b>910,942,190</b>	<b>100 %</b>	<b>791,648,800</b>	<b>100 %</b>	<b>1,073,890,739</b>	<b>100 %</b>	<b>1,073,890,739</b>			
		01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		20 Paket	15,310,000	20 Paket	15,310,000	20 Paket	15,310,000	20 Paket	15,310,000	20 Paket	15,310,000	20 Paket	15,310,000	Setwan	Benteng
		01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	Setwan	Benteng	
		01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	100,000,000	2 Paket	105,000,000	Paket		Paket	-	2 Paket	100,000,000	2 Paket	100,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		200 Paket	75,000,000	200 Paket	75,000,000	200 Paket	75,000,000	200 Paket	75,000,000	200 Paket	75,000,000	200 Paket	75,000,000	Setwan	Benteng
		01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		40 Paket	44,000,000	40 Paket	46,200,000	40 Paket	48,510,000	40 Paket	50,935,500	40 Paket	53,482,275	40 Paket	53,482,275	Setwan	Benteng
		01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	Setwan	Benteng	
		01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Lap	56,500,000	12 Lap	56,500,000	12 Lap	56,500,000	12 Lap	56,500,000	12 Lap	56,500,000	12 Lap	56,500,000	Setwan	Benteng
		01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Lap	513,036,000	36 Lap	538,687,800	36 Lap	565,622,190	36 Lap	593,903,300	36 Lap	623,598,464	36 Lap	623,598,464	Setwan	Benteng
		01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok		Dok		Dok		Dok		Dok		Dok	Setwan	Benteng	
		01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dok	150,000,000			2 Dok	150,000,000			2 Dok	150,000,000	2 Dok	150,000,000	Setwan	Benteng
		<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>476,400,000</b>	<b>100 %</b>	<b>502,525,000</b>	<b>100 %</b>	<b>143,325,000</b>	<b>100 %</b>	<b>770,320,268</b>	<b>100 %</b>	<b>1,109,731,855</b>	<b>100 %</b>	<b>1,109,731,855</b>			
		01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	235,900,000	1 Unit	250,000,000	Unit		1 Unit	503,804,018	Unit	829,889,792	Unit	829,889,792	Setwan	Benteng
		01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Setwan	Benteng	
		01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	110,500,000	13 Unit	116,025,000	Unit		13 Unit	116,025,000	13 Unit	121,826,250	13 Unit	121,826,250	Setwan	Benteng
		01.2.07.07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Setwan	Benteng	
		01.2.07.08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	Setwan	Benteng	
		01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		35 Unit	130,000,000	35 Unit	136,500,000	35 Unit	143,325,000	35 Unit	150,491,250	35 Unit	158,015,813	35 Unit	158,015,813	Setwan	Benteng

01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Setwan	Benteng
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>510,853,120</b>	<b>100 %</b>	<b>536,396,750</b>	<b>100 %</b>	<b>563,216,338</b>	<b>100 %</b>	<b>591,384,717</b>	<b>100 %</b>	<b>620,954,484</b>	<b>100 %</b>	<b>620,954,484</b>				
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	15,000,000	12 Lap	15,750,000	12 Lap	16,537,500	12 Lap	17,364,375	12 Lap	18,232,594	12 Lap	18,232,594	12 Lap	18,232,594	Setwan	Benteng
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	254,592,120	12 Lap	267,322,700	12 Lap	280,688,585	12 Lap	294,730,577	12 Lap	309,467,637	12 Lap	309,467,637	12 Lap	309,467,637	Setwan	Benteng
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Lap		Setwan	Benteng
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	241,261,000	12 Lap	253,324,050	12 Lap	265,990,253	12 Lap	279,289,765	12 Lap	293,254,253	12 Lap	293,254,253	12 Lap	293,254,253	Setwan	Benteng
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>290,286,000</b>	<b>100 %</b>	<b>295,637,100</b>	<b>100 %</b>	<b>301,255,755</b>	<b>100 %</b>	<b>387,155,343</b>	<b>100 %</b>	<b>313,349,910</b>	<b>100 %</b>	<b>313,349,910</b>				
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	183,264,000	4 Unit	183,264,000	4 Unit	183,264,000	4 Unit	263,264,000	4 Unit	183,264,000	4 Unit	183,264,000	4 Unit	183,264,000	Setwan	Benteng
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	82,022,000	37 Unit	86,123,100	38 Unit	90,429,255	38 Unit	94,950,718	38 Unit	99,698,254	38 Unit	99,698,254	38 Unit	99,698,254	Setwan	Benteng
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Setwan	Benteng
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25,000,000	35 Unit	26,250,000	40 Unit	27,562,500	45 Unit	28,940,625	50 Unit	30,387,656	50 Unit	30,387,656	50 Unit	30,387,656	Setwan	Benteng
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Setwan	Benteng
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Setwan	Benteng
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Setwan	Benteng
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Setwan	Benteng
		<b>kesejahteraan DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>15,581,522,912</b>	<b>100 %</b>	<b>15,256,850,000</b>	<b>100 %</b>	<b>15,720,904,000</b>	<b>100 %</b>	<b>15,339,944,000</b>	<b>100 %</b>	<b>15,220,904,000</b>	<b>100 %</b>	<b>15,220,904,000</b>				
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DP RD	25 Orang/bulan	14,609,918,912	25 Orang/bulan	14,249,300,000	25 Orang/bulan	14,249,300,000	25 Orang/bulan	14,249,300,000	25 Orang/bulan	14,249,300,000	25 Orang/bulan	14,249,300,000	25 Orang/bulan	14,249,300,000	Setwan	Benteng
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DP RD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DP RD yang Disediakan	100 Paket	440,644,000	100 Paket	440,644,000	125 Paket	940,644,000	125 Paket	440,644,000	125 Paket	440,644,000	125 Paket	440,644,000	125 Paket	440,644,000	Setwan	Benteng
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DP RD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	530,960,000	25 Orang	566,906,000	25 Orang	530,960,000	25 Orang	650,000,000	25 Orang	530,960,000	25 Orang	530,960,000	25 Orang	530,960,000	Setwan	Benteng
<b>01.2.16</b>	<b>Layanan administrasi DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>99,993,000</b>	<b>100 %</b>	<b>724,340,364</b>	<b>100 %</b>	<b>1,027,986,914</b>	<b>100 %</b>	<b>1,275,669,076</b>	<b>100 %</b>	<b>1,263,628,380</b>	<b>100 %</b>	<b>1,263,628,380</b>				
01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DP RD	12 Dok	35,000,000	12 Dok	50,000,000	12 Dok	50,000,000	12 Dok	65,000,000	12 Dok	50,875,000	12 Dok	50,875,000	12 Dok	50,875,000	Setwan	Benteng
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DP RD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DP RD	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	12 Lap	28,983,000	Setwan	Benteng
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Lap	36,010,000	8 Lap	37,810,500	10 Lap	39,701,025	12 Lap	41,686,076	14 Lap	43,770,380	14 Lap	43,770,380	14 Lap	43,770,380	Setwan	Benteng
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DP RD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DP RD yang Disediakan	Paket		Paket	607,546,864	Paket	909,302,889	Paket	1,140,000,000	Paket	1,140,000,000	Paket	1,140,000,000	Paket	1,140,000,000	Setwan	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pencapaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	4.02.02	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJMD dan RKP D (%)		100 %	16,941,603,188	100 %	17,173,533,736	100 %	17,603,387,285	100 %	18,025,692,546	100 %	18,455,785,570		18,455,785,570	Setwan	Benteng

Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD		Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggot DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan per da	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %						
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pemenuhan layanan dalam pembentukan per da	100 %	3,439,374,088	100 %	3,486,926,000	100 %	3,486,926,000	100 %	3,670,151,000	100 %	3,861,037,250	100 %	4,206,037,250									
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	5	Dok	361,500,000	5	Dok	361,500,000	5	Dok	361,500,000	5	Dok	379,575,000	5	Dok	398,553,750	5	Dok	398,553,750	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30	Dok	2,855,448,088	30	Dok	2,903,000,000	30	Dok	2,903,000,000	30	Dok	3,068,150,000	30	Dok	3,241,557,500	30	Dok	3,241,557,500	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Dok	222,426,000	3	Dok	222,426,000	3	Dok	222,426,000	3	Dok	222,426,000	3	Dok	220,926,000	3	Dok	220,926,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Dok			Dok			Dok			Dok	1	Dok	1	Dok	345,000,000	1	Dok	345,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan layanan dalam pembahasan kebijakan anggaran	100 %	800,000,000	100 %	830,000,000	100 %	861,500,000	100 %	894,575,000	100 %	929,303,750	100 %	929,303,750									
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10	Dok	50,000,000	10	Dok	52,500,000	10	Dok	55,125,000	10	Dok	57,881,250	10	Dok	60,775,313	10	Dok	60,775,313	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10	Dok	50,000,000	10	Dok	52,500,000	10	Dok	55,125,000	10	Dok	57,881,250	10	Dok	60,775,313	10	Dok	60,775,313	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11	Dok	250,000,000	11	Dok	262,500,000	11	Dok	275,625,000	11	Dok	289,406,250	11	Dok	303,876,563	11	Dok	303,876,563	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11	Dok	250,000,000	11	Dok	262,500,000	11	Dok	275,625,000	11	Dok	289,406,250	11	Dok	303,876,563	11	Dok	303,876,563	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester			Dok			Dok			Dok			Dok			Dok					Setwan	Benteng	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	Dok	200,000,000	10	Dok	200,000,000	10	Dok	200,000,000	10	Dok	200,000,000	10	Dok	200,000,000	10	Dok	200,000,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1,242,560,000	100 %	1,293,815,500	100 %	1,273,495,742	100 %	1,326,298,029	100 %	1,381,740,431	100 %	1,381,740,431									
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	Lap	223,455,000	15	Lap	234,627,750	15	Lap	216,359,137,00	15	Lap	227,177,094	15	Lap	238,535,949	15	Lap	238,535,949	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	Lap	208,950,000	15	Lap	219,397,500	15	Lap	230,367,375	15	Lap	241,885,744	15	Lap	253,980,031	15	Lap	253,980,031	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	Lap	199,950,000	15	Lap	209,947,500	15	Lap	220,444,875	15	Lap	231,467,119	15	Lap	243,040,475	15	Lap	243,040,475	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	Lap	208,950,000	15	Lap	219,397,500	15	Lap	230,367,375	15	Lap	241,885,744	15	Lap	253,980,031	15	Lap	253,980,031	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15	Lap	207,950,000	15	Lap	207,950,000	15	Lap	207,950,000	15	Lap	207,950,000	15	Lap	207,950,000	15	Lap	207,950,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	5	Dok	169,805,000	5	Dok	178,295,250	5	Dok	143,071,980	5	Dok	150,225,579	5	Dok	157,736,858	5	Dok	157,736,858	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5	Dok	9,500,000	5	Dok	9,500,000	5	Dok	9,500,000	5	Dok	9,500,000	5	Dok	9,500,000	5	Dok	9,500,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Dok	14,000,000	5	Dok	14,700,000	5	Dok	15,435,000	5	Dok	16,206,750	5	Dok	17,017,088	5	Dok	17,017,088	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan layanan peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4,698,364,500	100 %	4,698,364,500	100 %	5,117,037,807	100 %	4,698,364,500	100 %	4,698,364,500	100 %	4,698,364,500									
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	Dok	-	-	Dok	-	25	Dok	418,673,307	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78	Dok	1,546,752,500	78	Dok	1,546,752,500	78	Dok	1,546,752,500	78	Dok	1,546,752,500	78	Dok	1,546,752,500	78	Dok	1,546,752,500	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	Dok	264,000,000	60	Dok	264,000,000	60	Dok	264,000,000	60	Dok	264,000,000	60	Dok	264,000,000	60	Dok	264,000,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21	Orang	170,612,000	21	Orang	170,612,000	21	Orang	170,612,000	21	Orang	170,612,000	21	Orang	170,612,000	21	Orang	170,612,000	Setwan	Benteng	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60	Orang	186,000,000	60	Orang	186,000,000	60	Orang	186,000,000	60	Orang	186,000,000	60	Orang	186,000,000	60	Orang	186,000,000	Setwan	Benteng	

4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	75	Dok	2,520,000,000	75	Dok	2,520,000,000	75	Dok	2,520,000,000	75	Dok	2,520,000,000	75	Dok	2,520,000,000	75	Dok	2,520,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dok	11,000,000	1	Dok	11,000,000	1	Dok	11,000,000	1	Dok	11,000,000	1	Dok	11,000,000	1	Dok	11,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2,521,909,000</b>		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75	Lap	371,909,000	75	Lap	371,909,000	75	Lap	371,909,000	75	Lap	371,909,000	75	Lap	371,909,000	75	Lap	371,909,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dok	5,000,000	1	Dok	5,000,000	1	Dok	5,000,000	1	Dok	5,000,000	1	Dok	5,000,000	1	Dok	5,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75	Dok	2,145,000,000	75	Dok	2,145,000,000	75	Dok	2,145,000,000	75	Dok	2,145,000,000	75	Dok	2,145,000,000	75	Dok	2,145,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,000,000</b>		-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	Setwan	Benteng
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Lap	85,000,000	5	Lap	85,000,000	5	Lap	85,000,000	5	Lap	85,000,000	5	Lap	85,000,000	5	Lap	85,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.07	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan dalam Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>			-																	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok			Dok		Setwan	Benteng
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok			Dok		Setwan	Benteng
4.02.02.2.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan dalam Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,154,395,600</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,257,518,736</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,257,518,736</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,829,395,017</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,978,430,639</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,978,430,639</b>		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	30	Dok	3,061,730,000	33	Dok	3,157,453,136	36	Dok	3,157,453,136	40	Dok	3,631,587,317	44	Dok	3,718,993,734	44	Dok	3,718,993,734	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Lap	5,223,600	1	Lap	5,223,600	1	Lap	5,223,600	1	Lap	5,223,600	1	Lap	5,223,600	1	Lap	5,223,600	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	Dok	132,600,000	10	Dok	140,000,000	10	Dok	140,000,000	10	Dok	160,000,000	10	Dok	170,000,000	10	Dok	170,000,000	Setwan	Benteng
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	Dok	954,842,000	50	Dok	954,842,000	53	Dok	954,842,000	57	Dok	1,032,584,100	60	Dok	1,084,213,305	60	Dok	1,084,213,305	Setwan	Benteng
					<b>38,017,000,000</b>			<b>38,537,452,730</b>			<b>39,502,045,172</b>			<b>40,449,699,235</b>			<b>41,414,829,058</b>			<b>41,414,829,058</b>		

**tabel 6.2**  
**PERUBAHAN RENSTRA BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050.5889**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										a pada akhir periode Renstra Per	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD				Indeks Reformasi Sekretariat DPRD	C	CC		CC		B		B		A		A		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	0	B		B		BB		BB		A		A		
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja	50,91	63,03	21,075,396,812	70,28	21,363,918,994	70,53	21,898,657,887	71,51	22,424,006,689	72,31	22,959,043,489	72	109,721,023,871	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35	83		85		88		91		95		95		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	0	100	311,604,000	100	320,034,200	100	328,885,910	100	338,180,205	100	397,939,215	100	1,696,643,530	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	81,000,000	5	81,000,000	5	81,000,000	5	81,000,000	5	131,000,000	25	455,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	5	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	5	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	5	70,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	5	70,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	12	77,604,000	12	81,484,200	12	85,558,410	12	89,836,329	12	94,328,146	60	428,811,085	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	0	1	91,000,000	1	95,550,000	1	100,327,500	1	105,343,876	0	110,611,069	4	502,832,445	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang di selesaikan Tepat waktu	100	100	2,268,981,780	99	2,284,527,780	100	2,268,981,780	100	2,268,981,780	100	2,268,981,780	100	11,360,454,900	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	130	10,303,188,900	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD

		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	62,130,000	12	62,130,000	12	62,130,000	12	62,130,000	12	62,130,000	60	310,650,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	12	48,890,000	12	48,890,000	12	48,890,000	12	48,890,000	12	48,890,000	60	244,450,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	5	60,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	45,870,000	1	45,870,000	1	45,870,000	1	45,870,000	1	45,870,000	5	229,350,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	34,454,000	12	50,000,000	12	34,454,000	12	34,454,000	12	34,454,000	60	187,816,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	53,910,000	100	53,910,000	100	53,910,000	100	53,910,000	100	53,910,000	100	269,550,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	38,910,000	12	38,910,000	12	38,910,000	12	38,910,000	12	38,910,000	60	194,550,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	60	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	100	100	528,000,000	100	553,000,000	100	579,250,000	100	606,812,500	100	635,753,126	100	2,902,815,626	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12	28,000,000	12	28,000,000	12	28,000,000	12	28,000,000	12	28,000,000	60	140,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	150,000,000	10	157,500,000	10	165,375,000	10	173,643,750	10	182,325,938	50	828,844,688	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	29	350,000,000	29	367,500,000	29	385,875,000	29	405,168,750	29	425,427,188	145	1,933,970,938	SEKRETARIAT DPRD

		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	953,846,000	100	836,697,800	100	910,942,190	100	791,648,800	100	1,073,890,739	100	4,567,025,529	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	20	15,310,000	20	15,310,000	20	15,310,000	20	15,310,000	20	15,310,000	100	76,550,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	100,000,000	2	105,000,000	0	0	0	0	2	100,000,000	6	305,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	200	75,000,000	200	75,000,000	200	75,000,000	200	75,000,000	200	75,000,000	1000	375,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	40	44,000,000	40	46,200,000	40	48,510,000	40	50,935,500	40	53,482,275	200	243,127,775	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	56,500,000	12	56,500,000	12	56,500,000	12	56,500,000	12	56,500,000	60	282,500,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	36	513,036,000	36	538,687,800	36	565,622,190	36	593,903,300	36	623,598,464	180	2,834,847,754	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	150,000,000	0	0	2	150,000,000	0	0	2	150,000,000	6	450,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	100	476,400,000	100	502,525,000	100	143,325,000	100	770,320,268	100	1,109,731,855	100	3,002,302,123	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	235,900,000	1	250,000,000	0	0	1	503,804,018	1	829,889,792	4	1,819,593,810	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	13	110,500,000	13	116,025,000	0	0	13	116,025,000	13	121,826,250	52	464,376,250	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	35	130,000,000	35	136,500,000	35	143,325,000	35	150,491,250	35	158,015,813	175	718,332,063	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	510,853,120	100	536,396,750	100	563,216,338	100	591,384,717	100	620,954,484	100	2,822,805,409	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	15,000,000	12	15,750,000	12	16,537,500	12	17,364,375	12	18,232,594	60	82,884,469	SEKRETARIAT DPRD

		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	254,592,120	12	267,322,700	12	280,688,585	12	294,730,577	12	309,467,637	60	1,406,801,619	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	241,261,000	12	253,324,050	12	265,990,253	12	279,289,765	12	293,254,253	60	1,333,119,321	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100	100	290,286,000	100	295,637,100	100	301,255,755	100	387,155,343	100	313,349,910	100	1,587,684,108	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	4	183,264,000	4	183,264,000	4	183,264,000	4	263,264,000	4	183,264,000	20	996,320,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	36	82,022,000	37	86,123,100	38	90,429,255	38	94,950,718	38	99,698,254	187	453,223,327	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	30	25,000,000	35	26,250,000	40	27,562,500	45	28,940,625	50	30,387,656	200	138,140,781	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	30	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	15,581,522,912	100	15,256,850,000	100	15,720,904,000	100	15,339,944,000	100	15,220,904,000	100	77,120,124,912	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	0	25	14,609,918,912	25	14,249,300,000	25	14,249,300,000	25	14,249,300,000	25	14,249,300,000	125	71,607,118,912	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0	100	440,644,000	100	440,644,000	125	940,644,000	125	440,644,000	125	440,644,000	575	2,703,220,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	0	25	530,960,000	25	566,906,000	25	530,960,000	25	650,000,000	25	530,960,000	125	2,809,786,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100	100	99,993,000	100	724,340,364	100	1,027,986,914	100	1,275,669,076	100	1,263,628,380	100	4,391,617,734	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	0	12	35,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	65,000,000	12	50,875,000	60	250,875,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	0	12	28,983,000	12	28,983,000	12	28,983,000	12	28,983,000	12	28,983,000	60	144,915,000	SEKRETARIAT DPRD

		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	0	6	36,010,000	8	37,810,500	10	39,701,025	12	41,686,076	14	43,770,380	50	198,977,981	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	607,546,864	0	909,302,889	0	1,140,000,000	0	1,140,000,000	0	3,796,849,753	SEKRETARIAT DPRD
Mewujudkan				Indeks Reformasi Sekretariat DPRD	C	CC	38,017,000,000	CC	38,537,452,730	B	39,502,045,172	B	40,449,699,235	A	41,414,829,059	A	197,921,026,196	
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi			Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	0	100	38,017,000,000	100	38,537,452,730	100	39,502,045,172	100	40,449,699,235	100	41,414,829,059	100	197,921,026,196	
				Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	0	65		70		75		80		85		85		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	100	100	16,941,603,188	100	17,173,533,736	100	17,603,387,285	100	18,025,692,546	100	18,455,785,570	100	88,200,002,325	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Perda	100	100	3,439,374,088	100	3,486,926,000	100	3,486,926,000	100	3,670,151,000	100	3,861,037,250	100	17,944,414,338	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	5	361,500,000	5	361,500,000	5	361,500,000	5	379,575,000	5	398,553,750	25	1,862,628,750	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	30	2,855,448,088	30	2,903,000,000	30	2,903,000,000	30	3,068,150,000	30	3,241,557,500	150	14,971,155,588	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0	3	222,426,000	3	222,426,000	3	222,426,000	3	222,426,000	3	220,926,000	15	1,110,630,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	800,000,000	100	830,000,000	100	861,500,000	100	894,575,000	100	929,303,752	100	4,315,378,752	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0	10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	50	276,281,563	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0	10	50,000,000	10	52,500,000	10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	50	276,281,563	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	0	11	250,000,000	11	262,500,000	11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	55	1,381,407,813	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	0	11	250,000,000	11	262,500,000	11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	55	1,381,407,813	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100	100	1,242,560,000	100	1,293,815,500	100	1,273,495,742	100	1,326,298,030	100	1,381,740,432	100	6,517,909,704	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0	15	223,455,000	15	234,627,750	15	216,359,137	15	227,177,094	15	238,535,949	75	1,140,154,930	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	15	208,950,000	10	219,397,500	15	230,367,375	15	241,885,744	15	253,980,031	70	1,154,580,650	SEKRETARIAT DPRD

		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0	15	199,950,000	15	209,947,500	15	220,444,875	15	231,467,119	15	243,040,475	75	1,104,849,969	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0	15	208,950,000	15	219,397,500	15	230,367,375	15	241,885,744	15	253,980,031	75	1,154,580,650	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	0	15	207,950,000	15	207,950,000	15	207,950,000	15	207,950,000	15	207,950,000	75	1,039,750,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0	5	169,805,000	5	178,295,250	5	143,071,980	5	150,225,579	5	157,736,858	25	799,134,667	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	0	5	9,500,000	5	9,500,000	5	9,500,000	5	9,500,000	5	9,500,000	25	47,500,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0	5	14,000,000	5	14,700,000	5	15,435,000	5	16,206,750	5	17,017,088	25	77,358,838	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	4,698,364,500	100	4,698,364,500	100	5,117,037,807	100	4,698,364,500	100	4,698,364,500	100	23,910,495,807	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0	0	0	0	0	25	418,673,307	0	0	0	0	25	418,673,307	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0	78	1,546,752,500	78	1,546,752,500	78	1,546,752,500	78	1,546,752,500	78	1,546,752,500	390	7,733,762,500	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen)	0	60	264,000,000	60	264,000,000	60	264,000,000	60	264,000,000	60	264,000,000	300	1,320,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	21	170,612,000	21	170,612,000	21	170,612,000	21	170,612,000	21	170,612,000	105	853,060,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0	60	186,000,000	60	186,000,000	60	186,000,000	60	186,000,000	60	186,000,000	300	930,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	75	2,520,000,000	375	12,600,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	5	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	2,521,909,000	100	12,609,545,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0	75	371,909,000	75	371,909,000	75	371,909,000	75	371,909,000	75	371,909,000	375	1,859,545,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	0	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	75	2,145,000,000	375	10,725,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pelaksanaan dan pengawasan kode Etik DPRD	100	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD

		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	25	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pemenuhan Dalam Pembahasan Kerjasama Daerah	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Fasilitasi Tugas DPRD	100	100	4,154,395,600	100	4,257,518,736	100	4,257,518,736	100	4,829,395,016	100	4,978,430,636	100	22,477,258,724	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	0	30	3,061,730,000	33	3,157,453,136	36	3,157,453,136	40	3,631,587,316	44	3,718,993,734	183	16,727,217,322	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	5	26,118,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0	10	132,600,000	10	140,000,000	10	140,000,000	10	160,000,000	10	170,000,000	50	742,600,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0	50	954,842,000	50	954,842,000	53	954,842,000	57	1,032,584,100	60	1,084,213,302	270	4,981,323,402	SEKRETARIAT DPRD
<b>Total</b>							<b>38,017,000,000</b>		<b>38,537,452,730</b>		<b>39,502,045,172</b>		<b>40,449,699,235</b>		<b>41,414,829,059</b>		<b>197,921,026,196</b>	

tabel 6.3

PERUBAHAN RENSTRA BERDASARKAN KEMENDAGRI 050.900.1.15.5.17 TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										pada akhir periode Renstra Per		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD				Indeks Reformasi Sekretariat DPRD	C	CC		CC		B		B		A		A		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	0	B		B		BB		BB		A		A		
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja	50.91					70.53	21,898,657,887	71.51	22,424,006,689	72.31	22,959,043,489	72	109,721,023,871	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35					88		91		95		95		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	0					100	328,885,910	100	338,180,205	100	397,939,215	100	1,696,643,530	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0					5	81,000,000	5	81,000,000	5	131,000,000	25	455,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0					1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	5	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0					1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	5	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0					1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	5	70,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0					1	14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	5	70,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0					12	85,558,410	12	89,836,329	12	94,328,146	60	428,811,085	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	0					1	100,327,500	1	105,343,876	0	110,611,069	4	502,832,445	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang di selesaikan Tepat waktu	100					100	2,268,981,780	100	2,268,981,780	100	2,268,981,780	100	11,360,454,900	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0					26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	26	2,060,637,780	130	10,303,188,900	SEKRETARIAT DPRD



		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0				29	385,875,000	29	405,168,750	29	425,427,188	145	1,933,970,938	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100				100	910,942,190	100	791,648,800	100	1,073,890,739	100	4,567,025,529	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0				20	15,310,000	20	15,310,000	20	15,310,000	100	76,550,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0				0	0	0	0	2	100,000,000	6	305,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0				200	75,000,000	200	75,000,000	200	75,000,000	1000	375,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0				40	48,510,000	40	50,935,500	40	53,482,275	200	243,127,775	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0				12	56,500,000	12	56,500,000	12	56,500,000	60	282,500,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0				36	565,622,190	36	593,903,300	36	623,598,464	180	2,834,847,754	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0				2	150,000,000	0	0	2	150,000,000	6	450,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100				100	143,325,000	100	770,320,268	100	1,109,731,855	100	3,002,302,123	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0				0	0	1	503,804,018	1	829,889,792	4	1,819,593,810	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0				0	0	13	116,025,000	13	121,826,250	52	464,376,250	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0				35	143,325,000	35	150,491,250	35	158,015,813	175	718,332,063	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100				100	563,216,338	100	591,384,717	100	620,954,484	100	2,822,805,409	SEKRETARIAT DPRD

		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0					12	16,537,500	12	17,364,375	12	18,232,594	60	82,884,469	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0					12	280,688,585	12	294,730,577	12	309,467,637	60	1,406,801,619	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					12	265,990,253	12	279,289,765	12	293,254,253	60	1,333,119,321	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100					100	301,255,755	100	387,155,343	100	313,349,910	100	1,587,684,108	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0					4	183,264,000	4	263,264,000	4	183,264,000	20	996,320,000	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0					38	90,429,255	38	94,950,718	38	99,698,254	187	453,223,327	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0					40	27,562,500	45	28,940,625	50	30,387,656	200	138,140,781	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					6	0	6	0	6	0	30	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100					100	15,720,904,000	100	15,339,944,000	100	15,220,904,000	100	77,120,124,912	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	0					25	14,249,300,000	25	14,249,300,000	25	14,249,300,000	125	71,607,118,912	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0					125	940,644,000	125	440,644,000	125	440,644,000	575	2,703,220,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	0					25	530,960,000	25	650,000,000	25	530,960,000	125	2,809,786,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100					100	1,027,986,914	100	1,275,669,076	100	1,263,628,380	100	4,391,617,734	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	0					12	50,000,000	12	65,000,000	12	50,875,000	60	250,875,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	0					12	28,983,000	12	28,983,000	12	28,983,000	60	144,915,000	SEKRETARIAT DPRD

		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	0				10	39,701,025	12	41,686,076	14	43,770,380	50	198,977,981	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0				0	909,302,889	0	1,140,000,000	0	1,140,000,000	0	3,796,849,753	SEKRETARIAT DPRD
Mewujudkan				Indeks Reformasi Sekretariat DPRD	C				B	39,502,045,172	B	40,449,699,235	A	41,414,829,059	A	197,921,026,196	
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi			Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	0				100	39,502,045,172	100	40,449,699,235	100	41,414,829,059	100	197,921,026,196	
				Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	0				75		80		85		85		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	100				100	17,603,387,285	100	18,025,692,546	100	18,455,785,570	100	88,200,002,325	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Perda	100				100	3,486,926,000	100	3,670,151,000	100	3,861,037,250	100	17,944,414,338	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0				5	361,500,000	5	379,575,000	5	398,553,750	25	1,862,628,750	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0				30	2,903,000,000	30	3,068,150,000	30	3,241,557,500	150	14,971,155,588	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0				3	222,426,000	3	222,426,000	3	220,926,000	15	1,110,630,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran	100				100	861,500,000	100	894,575,000	100	929,303,752	100	4,315,378,752	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0				10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	50	276,281,563	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0				10	55,125,000	10	57,881,250	10	60,775,313	50	276,281,563	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	0				11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	55	1,381,407,813	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	0				11	275,625,000	11	289,406,250	11	303,876,563	55	1,381,407,813	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0				10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100				100	1,273,495,742	100	1,326,298,030	100	1,381,740,432	100	6,517,909,704	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0				15	216,359,137	15	227,177,094	15	238,535,949	75	1,140,154,930	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0				15	230,367,375	15	241,885,744	15	253,980,031	70	1,154,580,650	SEKRETARIAT DPRD



		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0				5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	25	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pemenuhan Dalam Pembahasan Kerjasama Daerah	100				100	0	100	0	100	0	100	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Fasilitasi Tugas DPRD	100				100	4,257,518,736	100	4,829,395,016	100	4,978,430,636	100	22,477,258,724	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	0				36	3,157,453,136	40	3,631,587,316	44	3,718,993,734	183	16,727,217,322	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0				1	5,223,600	1	5,223,600	1	5,223,600	5	26,118,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0				10	140,000,000	10	160,000,000	10	170,000,000	50	742,600,000	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0				53	954,842,000	57	1,032,584,100	60	1,084,213,302	270	4,981,323,402	SEKRETARIAT DPRD
<b>Total</b>									<b>38,017,000,000</b>	<b>38,537,452,730</b>		<b>39,502,045,172</b>		<b>40,449,699,235</b>		<b>41,414,829,059</b>	<b>197,921,026,196</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 7.1

**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja urusan</b>	<b>Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD</b>
		<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
1.	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegritasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	N/A	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan Sekretariat Dewan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2021 - 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan mulai tahun 2022 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Benteng, 2023

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar



**MASDAR J PRATAMA, S.Kom,MM**

Pangkat : Pembina

NIP. 198406022010011012